

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Penyertaan Modal Negara (PMN) dan kinerja keuangan perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dengan koneksi politik sebagai variabel moderasi. PNBP dihitung dengan logaritma natural dari PNBP yang diterima negara dari dividen BUMN pada tahun observasi, PMN dihitung dengan dua cara yaitu ekuitas pemerintah dibagi pada total aset dan total ekuitas dibagi total aset, kinerja keuangan dihitung dengan perbandingan laba bersih dibagi dengan total aset, serta koneksi politik diketahui dengan cara membagi dewan direksi dan komisaris yang memiliki koneksi politik dengan jumlah dewan direksi dan komisaris pada perusahaan. Mengingat penelitian sebelumnya lebih banyak berfokus pada perusahaan swasta dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), studi ini penting untuk memahami faktor-faktor yang memengaruhi PNBP BUMN serta memberikan wawasan bagi kebijakan optimalisasi pendapatan negara. Penelitian ini menggunakan data dari Laporan Keuangan Pemerintah Pusat 2014–2023 dan sumber terbuka lainnya, penelitian ini mencakup 300 observasi yang dipilih dengan metode *purposive sampling*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PMN berdampak negatif terhadap PNBP, karena sering digunakan untuk menutup kerugian atau membiayai investasi jangka panjang. Sebaliknya, ROA berpengaruh positif terhadap PNBP, menegaskan bahwa BUMN yang lebih efisien dalam mengelola asetnya memberikan kontribusi lebih besar terhadap penerimaan negara. Koneksi politik memperlemah dampak negatif PMN terhadap PNBP, tetapi tidak memoderasi hubungan antara kinerja keuangan dan PNBP, menunjukkan bahwa direksi dan komisaris lebih fokus mempertahankan posisi daripada meningkatkan profitabilitas perusahaan dikarenakan tidak adanya tuntutan tegas untuk hal itu. Penelitian ini memperkaya literatur mengenai PMN, kinerja keuangan, dan peran koneksi politik dalam BUMN, serta memberikan implikasi praktis bagi pemerintah, manajemen BUMN, dan investor dalam pengambilan keputusan terkait optimalisasi pendapatan negara dan kebijakan keuangan perusahaan.

Kata Kunci: Politik Balas Budi, Penyertaan Modal Negara, Penerimaan Negara, Komisaris BUMN, Kinerja Keuangan

ABSTRACT

This study aims to analyze the influence of State Capital Injection (PMN) and the financial performance of State-Owned Enterprises (BUMN) on Non-Tax State Revenue (PNBP), with political connections as a moderating variable. PNBP is measured using the natural logarithm of the revenue received by the state from BUMN dividends in the observation year, while PMN is calculated in two ways: government equity divided by total assets and total equity divided by total assets. Financial performance is measured by net income divided by total assets, and political connections are determined by the proportion of board members and commissioners with political affiliations. Given that previous studies have primarily focused on private companies and Regional-Owned Enterprises (BUMD), this study is crucial for understanding the factors influencing PNBP in BUMN and providing insights into policies for optimizing state revenue. This research utilizes data from the Central Government Financial Reports (2014–2023) and other publicly available sources, covering 300 observations selected using purposive sampling. The findings indicate that PMN negatively impacts PNBP, as it is often used to cover operational losses or finance long-term investments. Conversely, ROA positively affects PNBP, confirming that BUMN with efficient asset management contribute more significantly to state revenue. Political connections weaken the negative impact of PMN on PNBP but do not moderate the relationship between financial performance and PNBP, suggesting that directors and commissioners prioritize maintaining their positions over improving company profitability due to the absence of strict performance demands. This study enriches the literature on PMN, financial performance, and the role of political connections in BUMN, while also providing practical implications for policymakers, BUMN management, and investors in making decisions related to state revenue optimization and corporate financial policies.

Keywords: Patronage Politics, State Capital Injection, State Revenue, BUMN Commissioners, Financial Performance